

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak yang patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan

¹Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 1.

dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: *Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.* Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga.² Karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Kenakalan anak setiap tahun meningkat, oleh karena itu,

² Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1-2.

berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*).³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif* atau diversifikasi. Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkan diversifikasi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative*.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya

³Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hal. 1.

korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁴

Penyidikan dalam perkara anak nakal menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam KUHP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS). Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana di KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini Polri. Sejalan dengan hal tersebut dengan diberlakukannya Undang-undang pengadilan anak telah dipertegas, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat (1) undang-undang bersangkutan yang menyebutkan:

⁴Edwin Syah Putra, 2013, *Restorative Justice (Pengertian, Prinsip, dan Keberlakuannya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia)*, dalam <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses Senin 9 Maret 2015 Pukul 20:52.

Penyidik terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun penyidiknya Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam undang-undang Pengadilan anak dikenal adanya penyidik anak.⁵

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam penanganan perkara anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan dari aparat penegak hukum seringkali memandang sama, antara tindak pidana dengan pelaku anak dan

⁵Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal. 38.

dewasa, sehingga seringkali para penegak hukum lebih memilih jalan ringan yaitu dengan melanjutkan kasus tindak pidana dengan pelaku anak ke jalur peradilan, padahal efek negatif dari proses peradilan terhadap anak, yaitu efek pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.⁶

Seperti contoh kasus yang terjadi di Lumajang gara-gara mencuri cabai, tiga anak usia belasan tahun harus mendekam di lembaga pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Lumajang. Mereka adalah EF 15 tahun, B 15 tahun dan F 15 tahun. Pencurian ini dilakukan di lahan milik H Makrus, warga Dusun Sumbersari, desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Kasus di atas merupakan kasus pencurian cabai oleh anak di bawah umur, tapi mengapa kasus tersebut harus di bawa ke peradilan dan mereka harus mendekam di lembaga pemasyarakatan. Apakah peran polisi sebagai penyidik di dalam kasus ini tidak berusaha menerapkan prinsip keadilan *Restoratif* yang sudah tercantum dalam UU SPPA atau memang anak tersebut tidak memenuhi syarat untuk penerapan keadilan *Restoratif*, prinsip keadilan tersebut wajib dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu Unit PPA selaku penyidik. Sama halnya dengan yang terjadi di Polresta Surakarta yang sangat sering melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dengan pelaku anak, menurut hasil pengamatan langsung (Pra Penelitian) penulis, ada beberapa kasus tindak pidana

⁶Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hal. 319.

dengan pelaku anak yang hanya diselesaikan di Polresta Surakarta (tanpa di teruskan ke pengadilan). Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai penerapan keadilan *Restoratif* oleh Polresta Surakarta dalam tindak pidana dengan pelaku anak.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai prinsip keadilan *Restoratif*, sehingga penulis memilih judul **“PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK (STUDI KASUS DI POLRES SURAKARTA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana peran UNIT PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Surakarta?
2. Bagaimana hambatan Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* di Polresta Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Tujuan objektif

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peran Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *Restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Surakarta.
- 2) Untuk mengetahui apa saja hambatan dan kendala yang dialami oleh pihak penyidik Kepolisian yaitu Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b) Tujuan subjektif

Untuk melengkapi syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagaimana peran polisi dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak oleh Polresta Surakarta.
- 2) Dapat menambah pengetahuan, pemahaman tentang apa yang diteliti penulis.

b) Manfaat praktis

Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini penyidik anak yaitu Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) di Polresta Surakarta dalam rangka peran polisi dalam penerapan prinsip *restorative justice* supaya sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan peraturan lainnya.

D. Kerangka pemikiran

Unit PPA menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA)

“Pasal 1 Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya”

“Pasal 3 Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”

“Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Unit PPA menyelenggarakan fungsi; (a) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, (b) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, (b) Menyenggarakan kerja sama koordinasi dengan instansi terkait”

Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

“Pasal 1 ayat 6 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative justice on Overview*" mengatakan: "*Restorative justice is a proces whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁷

Prinsip *restorative justice* tersebut menurut penulis sangat baik digunakan untuk menangani perkara anak, dikarenakan itu sangat melindungi anak dari jeratan hukum. karena sikap anak cenderung meniru pelaku seseorang yang berada di sekitar lingkungan mereka, sehingga mereka perlu dilindungi dan di arahkan ke jalan yang lebih baik. Kemudian jika seorang anak dijerat hukum dan di masukkan penjara maka secara tidak langsung psikis mereka akan terganggu dan jika seorang anak

⁷Damang, 2012, *Restorative Justice*, dalam, <http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html?m=1>, diakses Rabu 11 Maret 2015, pukul 20:52.

⁸Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hal. 42.

keluar dari penjara maka ia akan melakukan perbuatan yang lebih jahat itulah mengapa perlu dilakukan prinsip *restorative justice*.

E. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸ Penelitian ini tentang peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Surakarta menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris dan harus dilakukan di lapangan.⁹

Peneliti tidak saja mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, tapi juga menggunakan bahan-bahan yang bersifat normatif dalam rangka

⁹Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60-61.

mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan mengenai peran Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *Restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Surakarta.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis ingin berusaha mendiskripsikan mengenai peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta dan apa saja hambatan dan kendala dalam penerapan prinsip tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Polresta Surakarta yaitu bagian Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dimana lembaga tersebut pernah menangani tindak pidana dengan pelaku anak yang diselesaikan di luar pengadilan.

4. Jenis Data

¹⁰Amirydin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹ Data primer ini diperoleh dari nara sumber dari Polresta Surakarta yaitu Unit PPA, khususnya tentang peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *Restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak dan apa saja hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* tersebut.
- b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹² Data sekunder ini terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yang berupa : meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, PERMA NO 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP dan KUHPA.

¹¹*Ibid*, hal. 30.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 12.

- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

5. Metode pengumpulan data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak dan apa saja hambatan dan kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* oleh Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) di Kepolisian pada tindak pidana dengan pelaku anak.

- b. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹³ Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam

¹³ Amirydin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hal. 82.

skripsi ini, di antaranya penulis ingin menanyakan bagaimana peran Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta surakarta dan apa saja hambatan dan kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Surakarta.

6. Metode analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹⁴ Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

F. Sistematika skripsi

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, sistematis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

¹⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, hal. 77.

Bab II tinjauan pustaka. Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang anak yaitu pengertian anak dan hak-hak anak, tinjauan umum tentang tindak pidana yaitu mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tinjauan umum tentang *Restorative justice* dan tinjauan umum tentang penyidik anak atau Unit PPA.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan. dalam bab ini dijelaskan tentang bagaimana peran Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak dan apa saja hambatan dan kendala dari Unit PPA dalam menerapkan prinsip *restorative justice*.

Bab IV Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.